

**Implementasi Kebijakan Pengembangan Pertanian dalam Revitalisasi
Pertanian Daerah Tertinggal Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka
Selatan**

Tugas Akhir

**Oleh :
Rian Ganesha
NIM.L2D 005 393**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perencanaan pada beberapa periode belakangan ini memperlihatkan adanya perubahan yang sangat fundamental. Adanya perubahan paradigma perencanaan yang pada mulanya bersifat dari atas kebawah menjadi dari bawah keatas menunjukkan bahwa proses pembangunan dengan sistem terpusat menimbulkan banyak ketimpangan dan ketidakstabilan politik pada tataran lokal. Oleh karena itu, desentralisasi menjadi isu sentral pada sebagian besar negara-negara di dunia terutama pada negara-negara berkembang (Oates, 1999). Penerapan sistem desentralisasi ini diharapkan mampu dengan berkesinambungan mentranfer pemerataan kekuasaan politik dari pusat ke tingkat pemerintahan lokal (Dillinger, 1994). Di samping itu, penerapan sistem desentralisasi dinilai lebih efektif dalam mengimplementasikan setiap kebijakan pembangunan wilayah (Armstrong dan Taylor, 2000).

Otonomi daerah yang diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 merupakan suatu langkah kebijakan strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan yang merata pada seluruh wilayah di Indonesia dalam rangka penerapan sistem desentralisasi. Hal tersebut terkait dengan permasalahan pembangunan yang selama ini paling dirasakan oleh Bangsa Indonesia yaitu permasalahan obyek dan subyek pembangunan (Kasiyanto, 1994). Di mana permasalahan subyek pembangunan mengarah pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan yang tidak merata pada setiap daerah dan permasalahan obyek pembangunan yang cenderung mengarah pada permasalahan ketertinggalan dan disparitas pembangunan akibat hasil dari kebijakan sektor publik yang terpusat sehingga menimbulkan ketidakseimbangan distribusi antara daerah yang kaya dan daerah yang miskin (Prudhomme, 1995).

Pada dasarnya ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bermula dari satu permasalahan yang sangat krusial yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan (Kartasasmita, 1996). Hal tersebut disebabkan masyarakat miskin yang pada umumnya lemah dalam aspek finansial dan tidak mempunyai akses yang cukup dalam mengusahakan kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dengan masyarakat lain yang memiliki potensi yang lebih besar untuk dapat berkembang lebih cepat. Jurang perbedaan tersebut yang kemudian semakin melebar dan menjadikan masyarakat miskin semakin terpuruk dan sebagian

masyarakat lain yang cukup beruntung dapat hidup dengan lebih baik. Bahkan tidak hanya miskin secara sektoral tetapi juga meningkat pada konteks spasial.

Selain itu, ditambah dengan beberapa dekade yang lalu orientasi kebijakan pembangunan hanya terpusat pada daerah pusat pertumbuhan yang menjadikan adanya perbedaan percepatan pembangunan pada setiap daerah. Daerah dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang memadai akan lebih cepat berkembang dari pada daerah yang lain. Walaupun demikian perkembangan pembangunan yang pesat pada daerah yang kaya tersebut tidak memberikan efek terhadap wilayah atau daerah dibelakangnya. Sehingga jurang pembangunan pun semakin terlihat terutama dari sisi penyediaan infrastruktur wilayah yang kebanyakan terpusat pada suatu wilayah tertentu. Keadaan demikian yang menjadikan munculnya fenomena banyak daerah tertinggal di Indonesia.

Daerah Tertinggal berdasarkan definisi Bappenas (2006) merupakan daerah yang mempunyai aksesibilitas rendah terhadap pusat-pusat pertumbuhan karena minimnya sarana dan prasarana perhubungan atau letak geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, umumnya mempunyai pertumbuhan ekonomi rendah yang ditandai oleh masyarakatnya yang tergolong sebagai masyarakat pra sejahtera dengan tingkat pelayanan sosial dan fasilitas umum yang rendah. Daerah tertinggal kebanyakan berada pada lokasi geografis di pedalaman, pegunungan, pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dengan jumlah penduduk yang terbatas dan didominasi mata pencaharian pertanian dan perikanan skala kecil. Adat istiadat masyarakat pun masih sangat kuat sehingga sulit untuk menerima budaya dari luar yang mengakibatkan rendahnya penguasaan teknologi oleh masyarakat. Definisi lain dari daerah tertinggal menyebutkan bahwa daerah tertinggal merupakan suatu daerah yang relatif kurang berkembang jika dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional berdasarkan kriteria ekonomi, sumberdaya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah (KPDT, 2005) serta daerah yang merupakan kantong-kantong kemiskinan yang miskin baik secara sosial (penduduk) maupun wilayahnya (BPS, 1994). Wilayah dengan berbagai dinamika perkembangan dan pertumbuhannya akan mengikuti arah perkembangan kebijakan yang menjadi dasar dalam proses pembangunan. Suatu daerah menjadi daerah maju atau tertinggal sangat bergantung oleh instrumen kebijakan yang diambil oleh setiap pemegang kepentingan karena kesenjangan dan ketimpangan tidak hanya dihasilkan dari perbedaan sumber daya alam dan sosial kultural masyarakat tetapi juga kebijakan turut memainkan peranan penting (ESCAP, 2001).

Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu kabupaten tertinggal dari dua kabupaten tertinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KPDT, 2005). Predikat ketertinggalan tersebut berdasarkan kriteria ketertinggalan yang telah ditentukan oleh Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (2005) yaitu dilihat dari aspek ekonomi dengan indikasi jumlah penduduk miskin, aspek

sosial yang diindikasikan dari kondisi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi infrastruktur serta kriteria lain yang digambarkan dari jumlah dana yang dapat digunakan untuk pembangunan. Kabupaten lain yang juga mendapat status tertinggal di provinsi ini adalah Kabupaten Belitung Timur. Namun menurut hasil rakornas KPDT (2008), Kabupaten Belitung Timur termasuk kedalam 40 kabupaten yang lepas dari ketertinggalan mulai tahun 2007. Sedangkan Kabupaten Bangka Selatan masih tetap berada pada status ketertinggalan sehingga menjadi salah satu prioritas sasaran lokasi pembangunan daerah tertinggal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun 2009 (KPDT, 2008).

Status tertinggal yang masih disandang oleh Kabupaten Bangka Selatan didasari oleh hasil evaluasi dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal setiap tahunnya dimana pada tahun 2007 kondisi pada setiap indikator ketertinggalan yang ditetapkan oleh KPDT masih belum menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2007 masih banyaknya jumlah keluarga yang tergolong kedalam Pra KS yaitu sebanyak 2.544 KK dengan jumlah penduduk miskin pada kabupaten ini sebanyak 16.965 jiwa (BPS, 2005). Di samping itu, masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya taraf hidup pada kabupaten ini (Strada Basel, 2007). Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat tersebut menyebabkan 90 % penduduk di kabupaten ini masih menggantungkan hidup mereka dari alam yang salah satunya adalah dengan melakukan usaha pertanian.

Sektor pertanian merupakan sektor basis yang menyumbang hampir dari 35 % pendapatan pada PDRB Kabupaten Bangka Selatan (BPS, 2007). Namun demikian, presentase kontribusi yang cukup tinggi tersebut tidak menjadikan masyarakat yang berprofesi sebagai petani mendapatkan kesejahteraan yang tinggi pula. Diketahui bahwa sebagai besar penduduk miskin pada kabupaten ini termasuk juga di Kecamatan Toboali bermata pencaharian sebagai petani. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pemerintah daerah setempat telah mengupayakan optimalisasi pengembangan pertanian terutama peningkatan kesejahteraan petani melalui penerapan agenda revitalisasi pertanian di daerah tertinggal dengan berbagai kebijakan yang tertuang pada RPJM, STRADA, RAD maupun pada kebijakan SKPD terkait. Walaupun hingga saat ini masih belum mencapai target yang diinginkan sehingga kabupaten ini masih tetap berada pada status tertinggal sebagai akibat kebijakan peningkatan produktivitas sektor kelompok miskin (pertanian) masih kurang berpengaruh secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Bangka Selatan secara agregat.

Oleh karena itu, menarik untuk dianalisis bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pertanian dalam revitalisasi pertanian daerah tertinggal di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

1.2 Perumusan Masalah

Ketimpangan dalam pembangunan selama ini mengindikasikan adanya pola keterpusatan dalam proses implementasi beberapa kebijakan pembangunan. Ketimpangan yang kemudian muncul menjadi problematika yang mengarah pada disintegrasi wilayah ini terjadi sebagai akibat setiap kebijakan yang direncanakan bersifat parsial sehingga belum mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan daerah-daerah lainnya secara menyeluruh. Selain itu, ketimpangan dan ketertinggalan wilayah juga merupakan wujud dari kondisi masyarakat yang masih berada pada garis kemiskinan dan belum ditunjang oleh adanya kebijakan atau program pembangunan yang berpihak terhadap masyarakat miskin (Edy, 2007). Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah melalui konsep pembangunan yang dapat memecahkan berbagai permasalahan untuk mengurangi kesenjangan dalam proses pemerataan pembangunan yang mampu memberikan efek penetesan terhadap daerah disekitarnya dengan tidak terbatas oleh wilayah teritorial (Friedmann dalam Simon, 1990). Pemerintah pun perlu menformulasikan produk kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal untuk memacu pertumbuhan wilayah dalam kerangka menuju pemerataan pembangunan.

Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan hasil kegiatan identifikasi, verifikasi dan validasi Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2006 merupakan kabupaten tertinggal dengan seluruh desa/kelurahan teridentifikasi sebagai daerah tertinggal. Ketertinggalan yang terjadi di kabupaten ini membutuhkan adanya upaya yang terencana guna merubah status daerah tertinggal menjadi daerah maju atau sejajar dengan daerah-daerah lain dengan menerapkan kebijakan strategis dalam mendorong percepatan pembangunan yakni kebijakan pembangunan sektor ekonomi berpihak terhadap kelompok miskin, berpihak terhadap pertumbuhan dan berpihak terhadap pekerjaan atau yang dikenal dengan strategi tiga jalur (*triple track strategy*). Operasionalisasi strategi tiga jalur salah satunya dilakukan dengan pembangunan sektor ekonomi yang dominan pada kelompok mayoritas yaitu melalui revitalisasi pertanian (Deptan, 2005). Pada Kabupaten Bangka Selatan, revitalisasi pertanian ini dilaksanakan pada berbagai kebijakan terkait dengan pengembangan pertanian. Walaupun hingga saat ini ternyata kebijakan pengembangan pertanian di Kabupaten Bangka Selatan dan Kecamatan Toboali pada khususnya masih cenderung belum efektif dalam mendukung terlepasnya status wilayah ini sebagai daerah tertinggal. Bahkan ada indikasi bahwa sebagian besar petani meninggalkan pekerjaan sebagai petani dan mencari profesi lain yang lebih menguntungkan disebabkan makin tingginya biaya operasional yang harus mereka keluarkan dan tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pengembangan pertanian yang diterapkan selama ini masih belum berpihak terhadap kepentingan petani. Untuk itu, muncul pertanyaan penelitian tentang

bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pertanian dalam revitalisasi pertanian daerah tertinggal di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pertanian dalam revitalisasi pertanian daerah tertinggal di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dalam mendukung proses percepatan pembangunan wilayah.

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

1. Menganalisis kebijakan pengembangan pertanian daerah tertinggal di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan
2. Mengidentifikasi karakteristik kelembagaan pemerintah dalam pembangunan pertanian daerah tertinggal di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Masukan bagi masyarakat dapat berupa rekomendasi tentang partisipasi masyarakat yang seharusnya dilakukan dalam mendukung program pengembangan pertanian dari Pemerintah Daerah. Selain itu juga, diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah terhadap hasil pelaksanaan (implementasi) kebijakan pengembangan pertanian dalam mencapai target revitalisasi pertanian di daerah tertinggal.

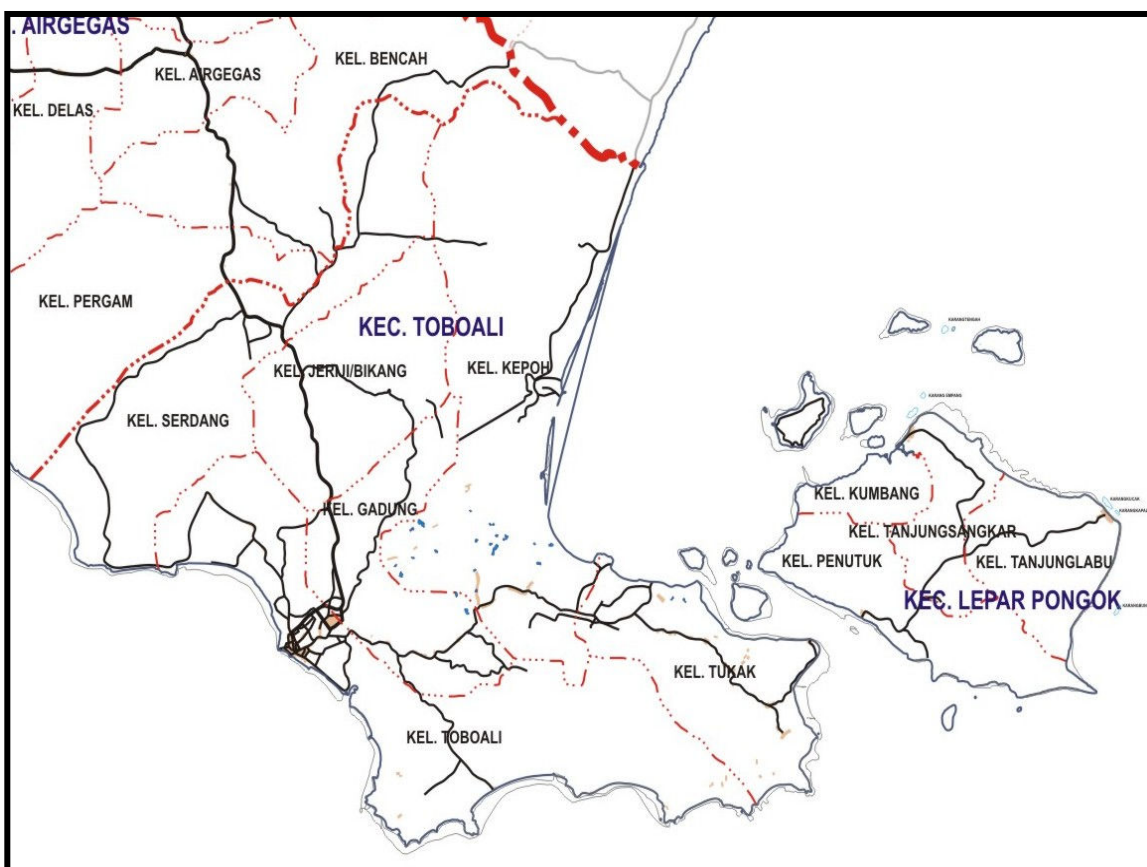
1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Obyek penelitian pada penelitian ini berupa dokumen, kondisi lapangan dan *stakeholder* (masyarakat dan pemerintah selaku pemangku kebijakan). Ketiganya merupakan obyek penelitian yang dikaji sesuai dengan pembatasan substansi yang ditetapkan. Pembahasan mengenai implementasi kebijakan pengembangan pertanian ini terkait dengan pelaksanaan revitalisasi pertanian pada daerah tertinggal. Di mana Revitalisasi dimaknai sebagai upaya membangun pertanian dengan menggalang komitmen dan kerja sama seluruh stakeholder untuk mengubah paradigma pola pikir masyarakat melihat pertanian tidak hanya urusan bercocok tanam yang hanya sekedar menghasilkan komoditas untuk dikonsumsi (Syafa'at, 2005). Oleh karena itu, substansi

dalam penelitian ini hanya sebatas studi kajian mengenai implementasi kebijakan pengembangan pertanian yang meliputi:

- Kebijakan Pengembangan Pertanian
- Karakteristik Kelembagaan Pemerintah

Substansi mengenai karakteristik kelembagaan pemerintah dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pertanian di daerah tertinggal dilihat melalui aspek transparansi lembaga, partisipasi masyarakat dan penguatan organisasi lokal. Sedangkan kebijakan pengembangan pertanian terkait dengan kompilasi kebijakan-kebijakan strategis dalam kebijakan pertanian dan agenda revitalisasi pertanian nasional yaitu dilihat dari pembiayaan, pembangunan infrastruktur pedesaan, inovasi dan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian, akses pasar, pengembangan industri agroindustri skala kecil di pedesaan, kemitraan, subsidi dan pajak, serta prosedur perijinan dalam kegiatan pengembangan pertanian di daerah tertinggal.



Sumber: RTRW Kab.Bangka Selatan, 2005

Gambar 1.1
Kecamatan Toboali sebagai Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian adalah Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari tiga kelurahan dan lima kecamatan. Namun, dengan pertimbangan adanya keterbatasan dari penyusun maka penyusun hanya akan melihat implementasi kebijakan pada satu kecamatan yang menjadi salah satu sentra pertanian di Kabupaten Bangka Selatan yaitu Kecamatan Toboali dengan kontribusi pertanian salah satu yang tertinggi di Kabupaten Bangka Selatan dan juga diproyeksikan dapat menjadi lumbung pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, obyek pertanian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan revitalisasi pertanian pada komoditi unggulan di Kabupaten Bangka Selatan yang berupa komoditi perkebunan dan tanaman pangan.

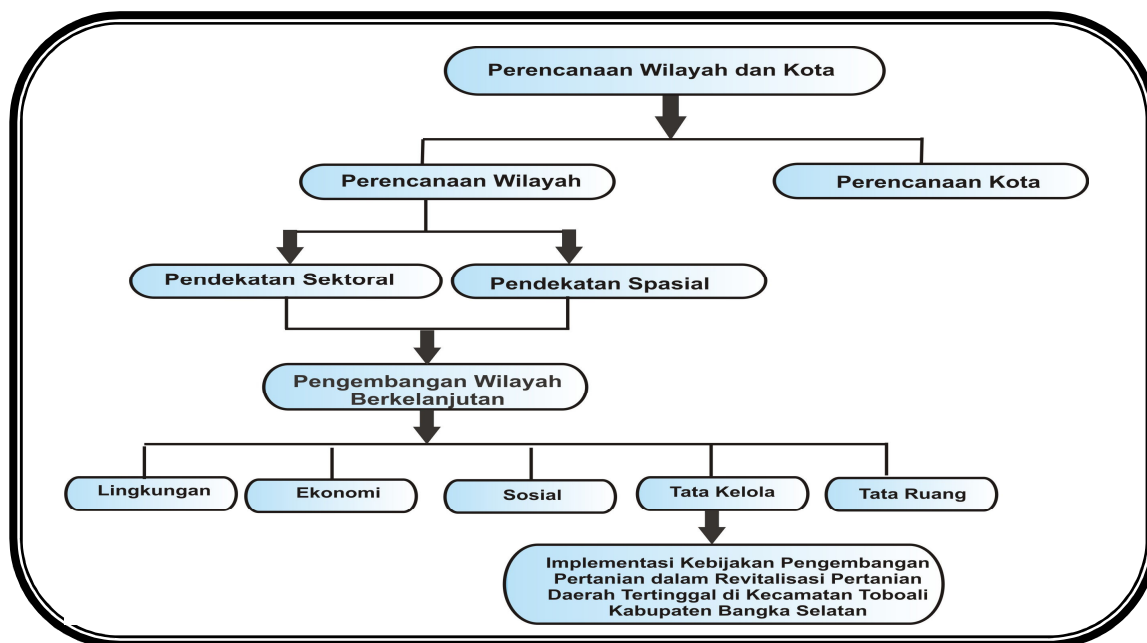
1.6 Posisi Penelitian

Posisi penelitian berfungsi untuk menunjukkan letak tema penelitian terhadap berbagai disiplin ilmu yang ada dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota. Posisi penelitian dengan tema kebijakan pembangunan pertanian daerah tertinggal ini berada dalam disiplin ilmu perencanaan wilayah. Wilayah dalam perkembangannya akan tumbuh sesuai dengan arahan instrumen kebijakan pembangunan yang ditetapkan. Instrumen kebijakan pembangunan dalam suatu wilayah harus terintegrasi untuk menghindari adanya pola-pola kesenjangan atau ketimpangan yang sangat rentan terjadi. Oleh karena itu, perlu ada suatu kesinergisan dan hubungan yang saling memperkuat antara kebijakan sentral dan spasial dalam suatu wilayah dalam mendukung proses percepatan pembangunan.

Terkait dengan pembangunan berkelanjutan, dimana tidak hanya ada tiga aspek yang harus diperhatikan (sosial, ekonomi dan lingkungan) namun ada satu aspek lagi yang menjadi sasaran yaitu pemerintahan atau didalam pembangunan wilayah berkelanjutan termasuk kedalam aspek tata kelola yang didalamnya terdapat instrumen kebijakan sebagai salah satu unsur penting yang perlu untuk dikaji dalam menumbuhkan iklim pertumbuhan wilayah yang merata dan dinamis.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian

Wilayah penelitian yang diambil adalah Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Hal tersebut disebabkan pada kabupaten ini semua kelurahan dan desa merupakan daerah tertinggal berdasarkan hasil identifikasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Ketertinggalan yang dialami oleh kabupaten ini lebih banyak disebabkan oleh minimnya keberadaan infrastruktur akibat hasil pembangunan yang terpusat sebelum proses pemekaran wilayah terjadi di Indonesia. Dengan adanya status tertinggal tersebut seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan telah menyiapkan beberapa strategi dan kebijakan pembangunan dalam upaya mempercepat proses pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah.

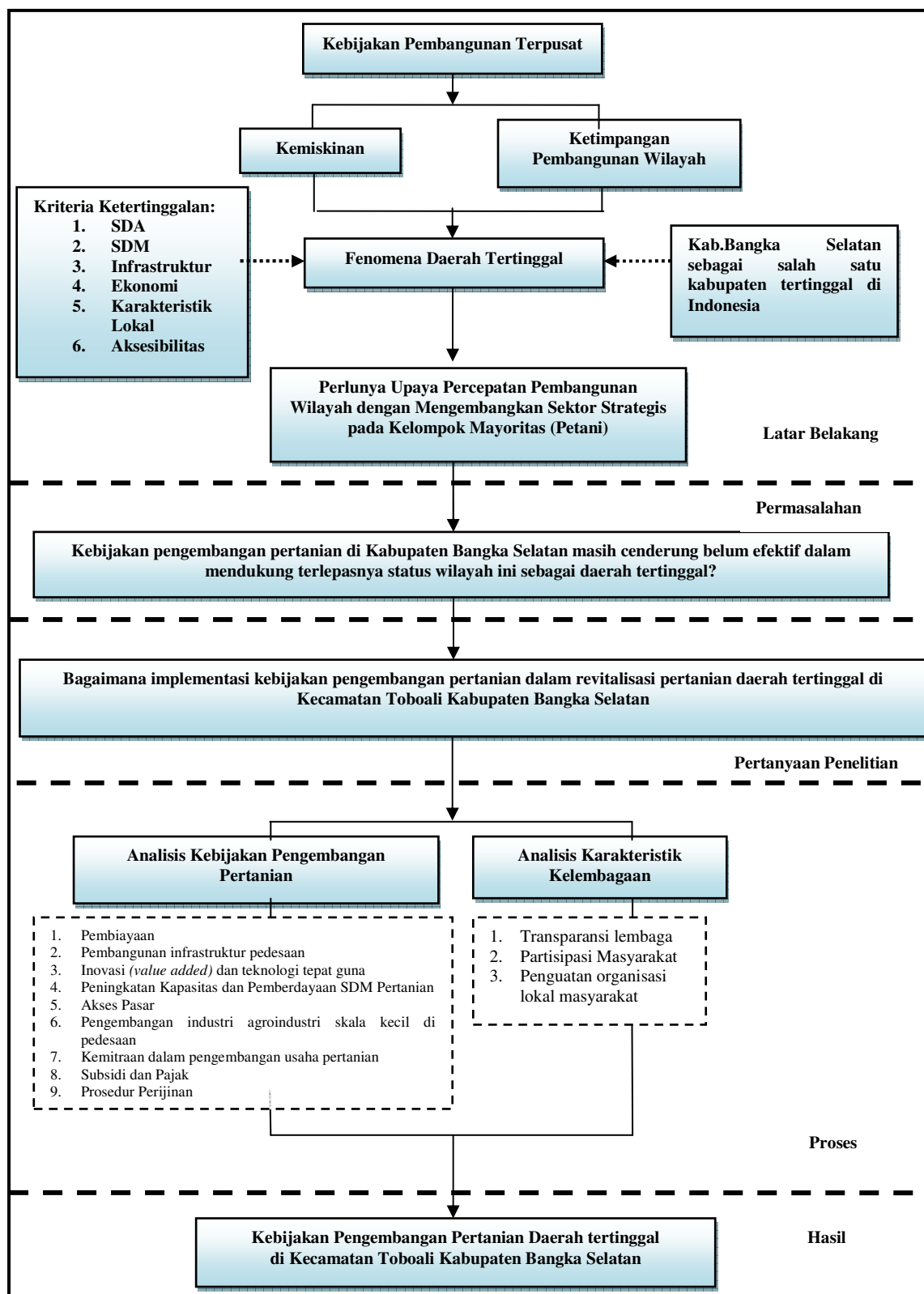


Sumber: Analisis Penyusun, 2009

Gambar 1.2
Posisi Penelitian dalam Bidang Ilmu PWK

Namun, dalam perkembangannya kebijakan pembangunan yang ditetapkan pada kabupaten ini masih belum mengindikasikan suatu kebijakan yang bersinergis dan menyeluruh terutama pada sektor-sektor strategis yang dapat mendukung percepatan pembangunan sesuai dengan karakteristik lokal yang mayoritas petani. Untuk itu, muncul pertanyaan penelitian bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pertanian dalam revitalisasi pertanian daerah tertinggal di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, ditetapkan sasaran-sasaran yang disertai dengan metode dan alat analisisnya. Analisis yang dilakukan adalah analisis untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri atas analisis karakteristik kelembagaan dan analisis kebijakan pengembangan pertanian yang ditetapkan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian di daerah tertinggal. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan pengembangan pertanian daerah tertinggal yang dilihat dari dua sisi yaitu dari kelembagaan sebagai aktor dari kebijakan dan kebijakan itu sendiri sebagai sebuah instrumen pembangunan. Untuk itu, latar belakang, permasalahan, proses serta keluaran yang diinginkan diilustrasikan dengan Gambar 1.3.



Sumber: Analisis Penyusun, 2009

Gambar 1.3
Kerangka Pikir Penelitian

1.8 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian bertujuan untuk membandingkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan membandingkan antar keduanya maka dapat diketahui perbedaan dan ciri khas penelitian yang sedang dilakukan, hal ini dapat dijadikan sebagai usaha untuk mengurangi plagiatisme. Beberapa hal yang penting diketahui dalam keaslian penelitian adalah lokasi, teknik analisis, variabel, dan hasil penelitian ataupun hasil yang diharapkan.

Penelitian mengenai kawasan tertinggal telah pernah dilakukan sebelumnya. Namun, pada penelitian-penelitian sebelumnya lebih mengarah pada pentipologian dan karakteristik kawasan tertinggal pada suatu daerah. Sedangkan pada penelitian ini difokuskan terhadap kebijakan dalam pembangunan daerah tertinggal. Untuk lebih jelasnya, perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel I.1.

TABEL I.1
KEASLIAN PENELITIAN

Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode yang digunakan
Imam H.Wahyudi	2002	Studi Tipologi Kawasan Tertinggal sebagai Dasar Penentuan Potensi Alokasi Dana Penanganan Kawasan Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur)	Pembagian 76 kawasan tertinggal di Kabupaten Bondowoso menjadi 8 tipe desa dengan karakteristik yang berbeda. Tipologi desa tertinggal tersebut menjadi dasar dalam penentuan alokasi dana penanganan kawasan tertinggal.	Pendekatan yang dipakai dalam analisis ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif eksploratif
Khaerudin	2002	Studi Identifikasi Karakteristik dan Perkembangan Pedesaan Tertinggal di Kabupaten Batang	Mengkaji wilayah-wilayah yang termasuk pedesaan tertinggal di Kabupaten Batang dengan pentipologian kawasan berdasarkan variabel BPS.	Kuantitatif dengan data-data dari BPS kemudian data dianalisis dengan menggunakan SPSS
Novi Sulistyaningsih	2007	Identifikasi Karakteristik Kawasan Tertinggal di Kota Semarang	Menentukan karakteristik kawasan tertinggal di Kota Semarang dengan menggunakan beberapa perbandingan yaitu kawasan tertinggal (miskin), harga lahan, ketersediaan sarana dan lokasi.	Menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis GIS
Rian Ganesha	2008	Implementasi Kebijakan Pengembangan Pertanian dalam Revitalisasi Pertanian Daerah Tertinggal di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan	Menganalisis bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi pertanian di daerah tertinggal dengan sasaran penelitian mengkaji karakteristik kelembagaan dan implementasi kebijakan.	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif

Sumber: Analisis Penyusun, 2009

1.9 Sistematika Pembahasan

Laporan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dari bab ini pembaca dapat mengetahui apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian, apa saja masalah yang akan dikaji, apa saja tujuan dan sasaran yang menjadi acuan dalam pencapaian output penelitian, bagaimana batasan ruang lingkup pembahasan yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Kemudian manfaat penelitian, keaslian dan posisi penelitian serta kerangka pikir yang menjadi dasar dan pedoman dalam proses pelaksanaan penelitian.

BAB II PENGEMBANGAN PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Berisi tentang kajian literatur yang relevan dengan studi yang diangkat. Adapun kajian literatur yang digunakan sebagai panduan dalam studi ini adalah konsep teoritis mengenai ketimpangan dan kemiskinan dan pendekatan kebijakan pembangunan pertanian ideal dalam pembangunan daerah tertinggal.

BAB III METODE ANALISIS

Dalam bab ini memuat metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, kerangka analisis, data penelitian, analisis data, serta teknik analisis.

BAB IV PEMBANGUNAN PERTANIAN DAERAH TERTINGGAL DI KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN

Bab ini berisi tentang kondisi umum Kabupaten Bangka Selatan dan Kecamatan Toboali berupa kondisi fisik wilayah, kondisi kependudukan, sosial dan ekonomi. Disamping itu, dibahas pula tentang potensi dan permasalahan dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Bangka Selatan dengan disertai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan usaha pengembangan pertanian di wilayah studi.

BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DALAM REVITALISASI PERTANIAN DAERAH TERTINGGAL

Berisi tentang analisis kebijakan pengembangan pertanian dan analisis karakteristik kelembagaan dalam implementasi kebijakan pengembangan pertanian di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi penelitian.